

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polda Lampung

Seiring dengan perkembangan dari masa kemasa, serta tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sudah tentu tidak terlepasnya dari gerak dan dinamika perjuangan Bangsa Indonesia, dan sebenarnya polisi bersama-sama kekuatan rakyat telah berkiprah pada awal-awal setelah proklamasi yang pada masa itu merupakan satu-satunya Kesatuan Bersenjata yang relatif kokoh dan lengkap serta terorganisir dengan baik, dengan modal tersebut Polisi bersama kekuatan Bersenjata lainnya turut terjun melujuti Senjata Tentara Jepang dan Belanda sekaligus bertempur mengusir bangsa Penjajah dari Tanah Air ini.

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945) di Daerah Lampung yang saat itu merupakan Keresidenan Lampung, yang dirintis oleh Kompol Tjik Agus yang berperan membangun Kepolisian di Daerah Lampung, kemudian R. Soeharjo Wardoyo dan Sultan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, keduanya diangkat oleh Residen RM. Abbas.

Berdasarkan Kepres Nomor : 52 tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi reorganisasi ditubuh Kepolisian, dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Keplosian RI disingkat PANGAK dan sebutan Markas Besar

Kepolisian RI disingkat MABAK dan tingkat daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK, sedangkan pada tingkat Komando pelaksana terdapat Komando Wilayah Kepolisian yang disingkat KOWIL, dan pada saat itu Daerah Lampung disebut KOWIL Lampung, dibawah Kodak VI Sumbagsel, yang antara lain dipimpin oleh Kombes Pol Turpedo, Kombes Pol Dalmi Turindo, Kombes Pol Pramo Yuwono, Kombes Pol Budi Yuwono, Kombes Pol Drs. Ismauludin, Kolonel Pol Drs. Suyono Prawiro Harjo dan Kolonel Pol Drs. Ridwan Hippy.

Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Propinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung dibawah Polda Sumbagsel, yang dipimpin oleh Kolonel Pol Drs. Joni Haryono, Kolonel Pol Drs. Sjahrul Mahmud, Kolonel Pol Drs. Harimas AS, Kolonel Pol Drs. LD. Nanlohy, Kolonel Pol Drs. Ramli Surbakti, Kolonel Pol Drs. Endang Suwanda dan Kolonel Pol Drs. Didy Kusumayadi.

Pada tanggal 2 Oktober 1996, dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 Polwil Lampung berubah menjadi Polda Lampung dengan status Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari Polda Sumbagsel, yang dipimpin oleh :

1. Kolonel Polisi Didy Kusumayadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 1996 s/d 1997.
2. Kolonel Polisi Drs. Gendro Budi Santoso sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 1997 s/d 1999.

Dengan Telegram Kapolri No Pol : TR/1787/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999 mengalami validasi dari Polda Tipe C menjadi Tipe B, yang dijabat oleh :

1. Brigjen Pol Drs. Riswahyono sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 1999 s/d 2000.
2. Brigjen Pol Drs. Suprihadi Sahadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 2000 s/d 2001.
3. Brigjen Pol Drs. Sugiri, SH, MSC sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 2001 s/d 2003.

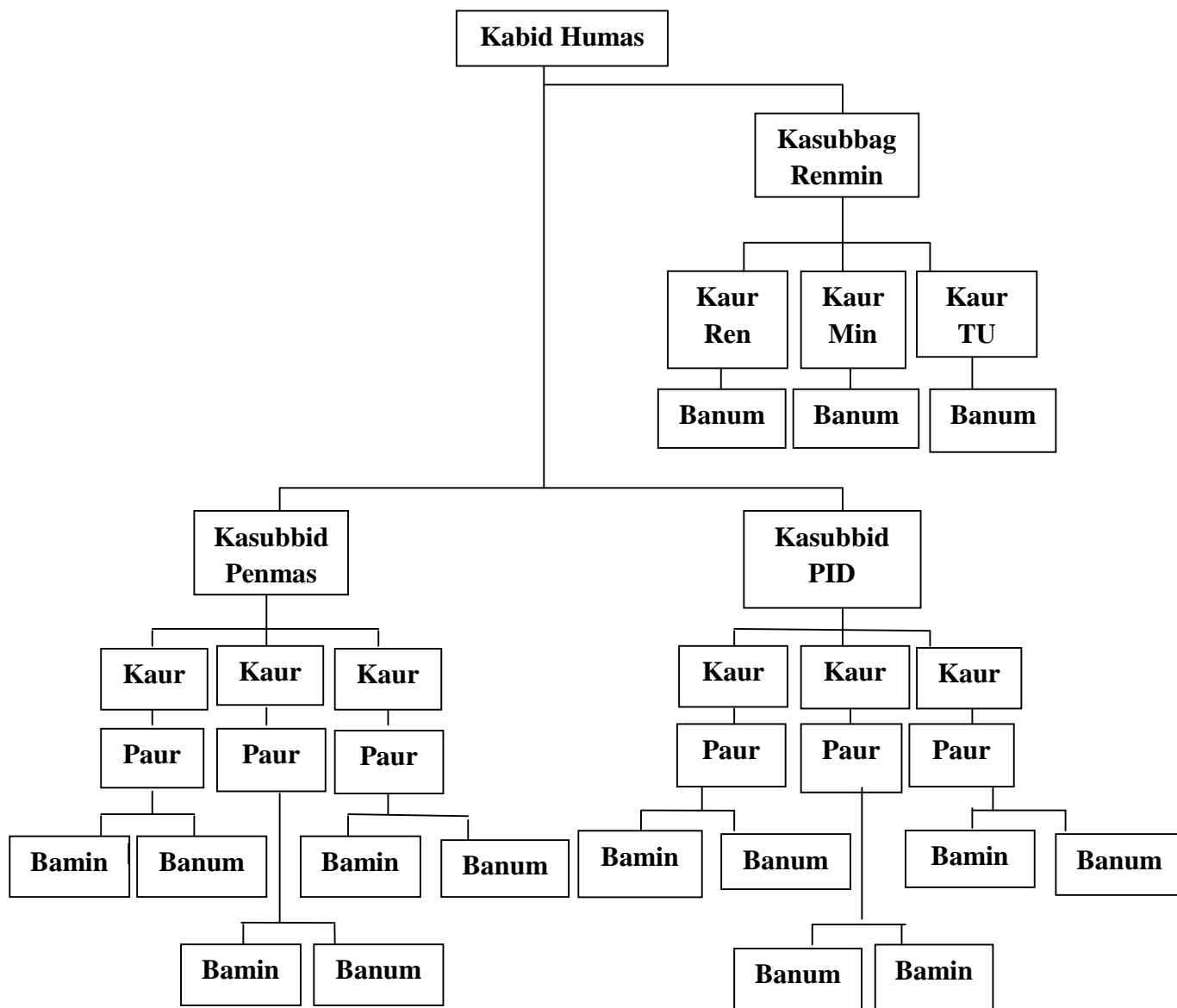
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/958/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 Polda dari Tipe B menjadi Tipe B 1, yang dijabat oleh :

1. Brigjen Pol Drs. MD. Primanto, SH, MH sebagai Kapolda Lampung dengan masa Bhakti tahun 2003 s/d 2004.
2. Brigjen Pol Drs. M. Rasyid Ridho, SH, MH sebagai Kapolda Lampung dengan masa Bhakti tahun 2004 s/d 2005.
3. Brigjen Pol Drs. Suharijono Kamino, MBA sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 2005 s/d 2008.
4. Brigjen Pol Drs. Ferial Manaf, SH, MM sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 2008 s/d 2009.
5. Brigjen Pol Drs. Edmon Ilyas, MH sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 2009 s/d 2010.
6. Brigjen Pol Drs. Sulistyio Ishak, SH MSi sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 02 April 2010 s/d 18 Oktober 2011.

7. Brigjen Pol Drs. Jodie Rooseto sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 19 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2012.
8. Brigjen Pol Drs. Heru Winarko, SH sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun 01 Nopember 2012 sampai dengan sekarang.

B. Bidang Humas Polda Lampung

Bagan 4.1 Struktur Organisasi bidang humas Polda Lampung :



Peran Humas Untuk Institusi Polri:

Humas Polri sebagai pemegang kendali pencitraan, sehingga kinerja humas Polri perlu dimantapkan guna menyiapkan seluruh jajaran menjadi penciptaan opini.

1) Visi Humas

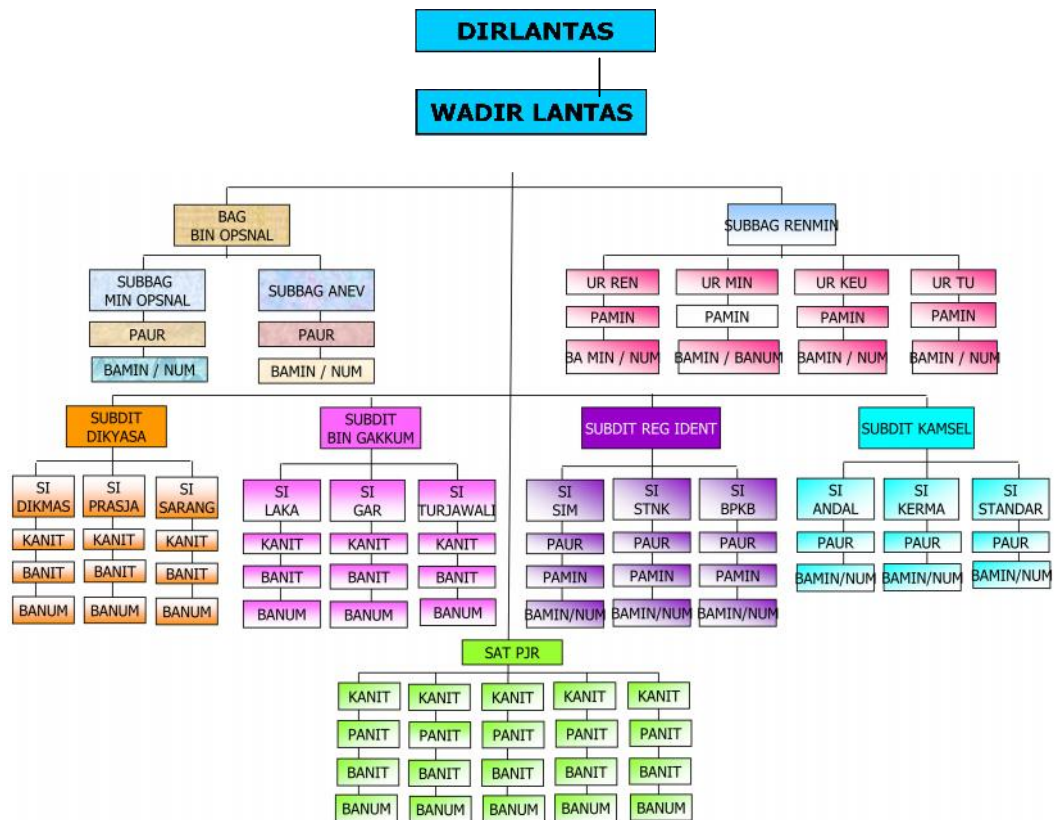
Menjadi penjuror untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini publik guna mewujudkan citra positif sesuai visi Polri melalui kemitraan dengan media dan seluruh komponen masyarakat.

2) Misi Humas

- a) Membangun kemampuan para anggota Polri pada umumnya dan pengemban fungsi humas pada khususnya,
- b) Membentuk iklim humas Polri yang mendukung kebijakan, system, struktu, anggaran, dsb dan menerapkan standarisasi sistem humas Polri,
- c) Membangun sarana dan prasarana humas Polri,
- d) Sebagai “*front office*” Polri pada setiap kesatuan,
- e) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan semua media dan komponen masyarakat,
- f) Menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat, dan akurat melalui jaringan terbuka baik bersifat internal dan eksternal dan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat guna membangun komunikasi dua arah.

C. Dikmas Lantas Polda Lampung

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dikmas Lantas Polda Lampung :



Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

- 1) Tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas :
 - a) Mendidik disiplin lalu lintas sejak usia dini;
 - b) Menumbuhkan pengertian, kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas;
 - c) Membangun kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, sektor bisnis dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka membangun kesadaran disiplin berlalu lintas;
 - d) Membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap polisi lalu lintas;

- e) Memberikan pembinaan dan penyuluhan berbagai masalah keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas;
 - f) Peningkatan kesadaran hukum;
 - g) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan instansi terkait; yang berkenaan dengan tingkat kepedulian dan kegiatan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Sasaran pendidikan masyarakat bidang lalu lintas adalah masyarakat yang terorganisir dan masyarakat yang tidak terorganisir;
- a) Masyarakat terorganisir
 - 1. TK/SD;
 - 2. SLTP dan SMA/SMK;
 - 3. Pramuka;
 - 4. PKS (Patroli Keamanan Sekolah);
 - 5. Mahasiswa;
 - 6. Karyawan;
 - 7. Perusahaan Otobus;
 - 8. Organisasi;
 - 9. Klub Otomotif, dan lain-lain.
 - b) Masyarakat tidak terorganisir :
 - 1. Pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - 2. Pejalan kaki;
 - 3. Pedagang kaki lima, pengatur lalu lintas tidak resmi/parkir.

D. PJR Dit Lantas Polda Lampung

Tugas Panit PJR Dit Lantas Polda Lampung :

1. Panit adalah unsur staf yang berada dibawah kanit pjr dalam penyelenggaraan, perencanaan, pembinaan pers dan matlog terbatas, yang berkaitan dengan administrasi.

2. Tugas pokok panit PJR meliputi :
 - a. Menghimpun serta mengelola data pers dan materiil.
 - b. Membantu penyiapan pelibatan – pelibatan personil dalam rencana penyelenggaraan operasi pengawalan dan peningkatan kemmpuan melalui latihan fungsi.
 - c. Membantu penyiapan rencana kebutuhan dan pembaharuan.
 - d. Matlog serta distribusi dan penghapusan matlog dilingkungan Sat PJR.
 - e. Menyusun Laporan pelaksanaan program kegiatan dan hasil giat secara periodik.
 - f. Melaksanakan urusan administrasi personil dan log dalam rangka bantuan ops kepada kewilayahan.
 - g. Menyelenggarakan koresponden dokumen termasuk pemeliharaannya dan ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan.
 - h. Mengatur dan menyiapkan hal – hal yang perlu untuk penyelenggaraan rapat pertemuan dan lain – lain yang memerlukan pengaturan khusus.
 - i. Melaksanakan pelayanan bagi keperluan personil yang berkenaan dengan kepentingan dinas.

- j. Melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi keberhasilan dan keindahan serta memelihara disiplin, tertib dan kesadaran hukum.